

Co-organizers:



Pernyataan dari Forum Feminis tentang Migrasi dan Pengungsian

30 November – 1 Desember 2024 -- Bangkok, Thailand

Solidaritas, Kesetaraan Martabat bagi Migran Perempuan dan Beragam Gender!

Para migran perempuan dan beragam gender, aktivis dan organisasi migran yang bergerak di bidang gender dan migrasi dari seluruh dunia berkumpul di *Forum Feminis tentang Migrasi dan Pengungsian* untuk membentuk kebijakan migrasi feminis yang bersifat *bottom-up* dan interseksional dalam mengatasi penyebab migrasi, realitas dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan dan beragam gender dalam migrasi dengan segala keberagamannya.

Hal ini merupakan sebuah pendekatan untuk membangun gerakan di kalangan perempuan dalam migrasi dan lintas gerakan – yang diantaranya bertujuan untuk mengatasi sifat sistemik patriarki dan penindasan lainnya di semua lembaga melalui praktik interseksional, guna melawan ketidaksetaraan kekuasaan di semua tingkatan.

Kami percaya bahwa feminisme harus menangani sistem yang menciptakan ketidaksetaraan. Kami menyadari bahwa perempuan mengalami berbagai bentuk penindasan -- terutama berdasarkan ras, kasta, kelas, gender, orientasi seksual, identitas gender, kewarganegaraan, agama, status migrasi, usia, status perkawinan, dan disabilitas. Pendekatan feminis interseksional dalam migrasi memusatkan suara migran dalam proses pengambilan keputusan dan mengadvokasi kebijakan dan program yang mendukung hak dan agensi mereka.

Transformasi sistem membutuhkan gerakan yang kuat, terorganisasi, dan terinformasi untuk membangun kekuatan dalam menuntut perubahan. Hal ini sangat efektif ketika berbagai sektor bekerja sama membentuk agenda terpadu untuk mengidentifikasi bagaimana berbagai masalah saling terkait, dan di mana suara serta kepemimpinan dari mereka yang terkena dampak langsung dapat membantu pembentukan agenda nasional dan global.

Migrasi harus menjadi prioritas utama dalam agenda feminis, mengingat sifat migrasi yang berbasis gender dan sentralitasnya dalam realitas global dan perubahan geopolitik. Perempuan migran meliputi separuh dari migran dunia. Mereka terdampak oleh faktor pendorong migrasi yang berbeda-beda dan mereka menghadapi berbagai bentuk diskriminasi yang tersebar dan saling terkait. Proses migrasi berdampak pada hak-hak perempuan dan beragam gender dalam berbagai hal seperti kerja layak, pengakuan kerja perawatan yang dibayar dan tidak dibayar, kekerasan dan pelecehan berbasis gender, akses ke hak-hak seksual dan reproduksi, nondiskriminasi dan partisipasi politik. Selain itu, sentimen anti-migran digunakan sebagai isu mobilisasi dalam kebangkitan rezim otoriter yang mengingkari hak perempuan dan meniadakan hak pekerja, hak migran, upaya untuk mengatasi perubahan iklim, dan banyak lagi.

Kelompok perempuan dan beragam gender menghadapi berbagai tantangan dalam migrasi, termasuk namun tidak terbatas pada:

- **Perubahan iklim, yang** sering kali mendorong pengungsian dan migrasi paksa. Disaat berbagai peristiwa terkait iklim semakin parah, hanya ada sedikit mekanisme nasional atau internasional untuk menangani hak dan solusi jangka panjang bagi mereka yang bermigrasi atau menjadi pengungsi. Krisis iklim berdampak pada tubuh, kesehatan, mata pencaharian, dan hak asasi manusia perempuan, termasuk ketahanan pangan, akses ke layanan, akses ke keadilan, keamanan kerja, dan perumahan. Respons terbatas yang ada jarang responsif gender. Perempuan pengungsi dan migran beragam gender dengan segala keberagamannya harus dilibatkan dalam pengembangan strategi untuk mengatasi perubahan iklim.
- **Pengetatan batas wilayah dan kriminalisasi:** Kriminalisasi migrasi menyebabkan penangkapan sewenang-wenang, penahanan, deportasi termasuk untuk perempuan hamil, pemisahan keluarga, akses terbatas untuk perawatan dan layanan, dan pelanggaran hak asasi manusia migran lainnya. Dengan meningkatnya sekuritisasi dan militerisasi batas wilayah, kehidupan dan hak-hak mereka yang bermigrasi, terutama melalui jalur yang tidak reguler, menjadi lebih berisiko.
- **Kurangnya pengakuan atas pekerjaan perawatan, baik yang dibayar maupun tidak dibayar:** Hal ini berdampak pada kemampuan pekerja migran perempuan untuk mendapatkan hak-hak ketenagakerjaan mereka, termasuk kondisi kerja yang aman, perlindungan upah, waktu istirahat yang dibayar, hak untuk berorganisasi dan melakukan perundingan bersama, upah yang layak, dan perlindungan sosial. Pekerja perawatan migran perempuan lebih berisiko mengalami kekerasan dan pelecehan berbasis gender, diskriminasi, pencurian upah, penyitaan paspor, isolasi, dan trauma. Pekerja perawatan migran perempuan yang bekerja di bawah sistem Kafala, mereka yang tidak berdokumen, atau mereka yang bekerja di sektor ekonomi perawatan informal, lebih berisiko mengalami pelanggaran hak.
- **Perang, konflik, intervensi, dan pendudukan** mendorong terjadinya migrasi dan pengungsian paksa. Dalam situasi ini, perempuan migran berisiko mengalami kekerasan dan

pelecehan berbasis gender, pelecehan seksual, pembunuhan, perdagangan manusia, kekerasan psikologis, dan trauma. Perempuan migran lebih berisiko mengalami pelanggaran hak-hak pekerja dan pengecualian dari layanan kemanusiaan dalam situasi peperangan, termasuk makanan dan tempat tinggal.

- **Berbagai bentuk diskriminasi:** Terjadi peningkatan xenofobia, rasisme, homofobia, transfobia, stigmatisasi, Islamofobia, pelabelan, kekerasan berbasis gender, dan pelecehan berdasarkan status migrasi. Diskriminasi berdasarkan status migrasi atau kependudukan, identitas gender, orientasi seksual, identitas ras, status perkawinan, dan disabilitas berdampak pada akses terhadap hak, sumber daya, dan layanan, serta mendorong perempuan migran ke lingkungan yang lebih eksploitatif. Ada kebutuhan mendesak untuk menciptakan narasi perlawanan terhadap narasi anti-imigran yang ada.
- **Akses untuk jalur migrasi reguler yang terbatas dan sangat berorientasi gender.** Perempuan dapat menghadapi banyak risiko dalam migrasi—dan risiko seperti perdagangan manusia, jeratan utang, dan kurangnya perlindungan upah dapat meningkat jika mereka tidak berdokumen. Status migrasi tidak reguler dapat semakin membatasi akses perempuan terhadap perawatan kesehatan dan perlindungan sosial serta kebebasan, seperti kebebasan bergerak dan kebebasan berserikat. Beberapa perempuan migran mungkin mengalami keadaan tanpa kewarganegaraan. Larangan perekrutan yang mengklaim untuk "melindungi perempuan" sebenarnya memaksa mereka untuk bermigrasi melalui jalur yang tidak reguler dan lebih berisiko.
- **Partisipasi politik dan kebebasan berserikat:** Perempuan migran di negara tujuan sering kali ditolak hak politik dan ketenagakerjaannya, termasuk kebebasan berserikat, hak untuk membentuk, bergabung, dan memimpin serikat pekerja, serta berunding bersama. Selain itu, mereka sering kali ditolak haknya untuk berpartisipasi dalam politik.

Kami mengundang seluruh jaringan kami dalam gerakan feminis untuk mengintegrasikan migrasi ke dalam agenda yang dimiliki dan bergabung dengan kami dalam memperjuangkan tuntutan ini - yang merupakan hal-hal penting dari serangkaian tuntutan yang jauh lebih luas:

- Semua migran perempuan dan beragam gender beserta keluarga mereka, terlepas bagaimana atau mengapa mereka bermigrasi, dari mana mereka bermigrasi, atau identitas apa yang mereka miliki, memiliki hak asasi manusia. **Migran adalah manusia dan harus diperlakukan dengan bermartabat dan rasa hormat!**
- **Dekriminalisasi migrasi.** Migrasi bukanlah kejahatan. Hal ini berarti penahanan harus diakhiri. Daripada berinvestasi dalam penahanan, termasuk pusat penahanan swasta, mengadvokasi sumber daya yang mendukung komunitas migran.
- Mendesak pemerintah untuk **membuat dan menegakkan undang-undang yang melindungi hak-hak migran** dan menuntut pertanggungjawaban pihak yang melanggar undang-undang ini.

- **Mengadvokasi untuk regularisasi bagi migran tak berdokumen**, jalur untuk mendapatkan izin tinggal jangka panjang untuk semua migran dan keluarganya, serta akses untuk mendapatkan kewarganegaraan bagi mereka yang menginginkannya.
- **Mendukung pekerja migran perempuan dan pekerja migran beragam gender dalam perjuangan mereka untuk perlindungan sosial dan kebebasan berserikat**, termasuk akses ke keadilan dan hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja. Mereka memiliki hak untuk berunding bersama dan memiliki suara dalam perumusan kebijakan migrasi. Tidak ada biaya yang dibebankan kepada migran dalam pelaksanaan perekrutan.
- Negara harus mengakui legitimasi kerja para **pembela hak asasi manusia migran** dengan segala keberagamannya, termasuk pembela hak asasi manusia migran.
- **Membangun aliansi feminis dan solidaritas kolektif** untuk mendesak undang-undang dan kebijakan nasional yang melindungi hak-hak pekerja rumah tangga dan menyerukan negara-negara untuk meratifikasi dan menerapkan Konvensi ILO 189 tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga dan Konvensi ILO 190 tentang mengakhiri kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.

Kami bersama saudara-saudara kami dalam gerakan feminis bersatu untuk menuntut diakhirinya peperangan dan pendudukan. Perang dan pendudukan tidak hanya meningkatkan pengungsian dan migrasi paksa, tetapi juga sering kali menelantarkan pekerja migran perempuan dan beragam gender dalam situasi konflik. Perempuan migran dan pengungsi dalam situasi konflik memiliki hak untuk merasa aman dan terbebas dari perdagangan manusia dan segala bentuk eksploitasi dan pelecehan lainnya. Mereka tidak boleh dikecualikan dari hak asasi manusia dan layanan-layanan kemanusiaan, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan bantuan hukum.

Bergabunglah dengan kami dalam menyerukan pendanaan untuk organisasi migrasi dan diaspora yang kolaboratif, fleksibel, mudah diakses, akuntabel, dan mendukung komunitas yang terdampak.

Kita menuntut martabat dan hak yang sama bagi semua migran perempuan dan beragam gender. Aksi kita menentukan siapa diri kita. Angkat suara Anda! Kekuatan feminis untuk satu dan semua!

- Dirilis pada 5 Desember 2024

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Women in Migration Network/WIMN

wimninfo@womeninmigration.org

www.womeninmigration.org